

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Asshiddiqie Jimly dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012
- Baihaki dan Arif Rachman, *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- G.H. Addink, G. Anthony, A.C. Buyse & C. Flinterman (eds.), *Human Rights & Good Governance*, Utrecht: Universiteit Utrecht, 2010
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Jawa Timur, 2016
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2017
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Lazaros E. Panourgias, *Banking Regulation and World Trade Law: GATS, EU and 'Prudential' Institution Building*, (Hart Publishing), 2006
- Liabrintika Oktaviani Gunawan, dkk, *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana
- Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2011
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi terbaru 2018*, Andi, Yogyakarta, 2018
- Muhammad Firdaus dan Tri Susanto, *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah versi 3.1*, Jakarta, 2023

- Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, Mataram University Press, Lombok, 2020
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancoran Tujuh Bina Aksara, Jakarta. 1971
- P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2019
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Rivlin, Alice M . *Systemic Risk and the Volcker Rule*, 2015
- Rini Handriyani dan Anindita Widya Sismiati, *Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level 2 versi 2*, Jakarta, 2021
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013
- Siti Juliantari Rachman dkk, *Pemetaan Potensi Kecurangan Dalam Metode E-Purchasing Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*, Indonesian Corruption Watch, 2023
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2006
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004
- Wildan Massani dan Ketsia Aprilianny Laya, *Modul Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah versi 3.1*, Jakarta, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023
- Y. Sogar Simamora, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Surabaya, Airlangga University Press, 2021
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Jurnal:

- Abenaya Satria Putra Nugraha dkk, 2021, *Implementasi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bogor Tahun 2020*, Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)
- Ade Haidir dkk, 2024, *Penerapan Kebijakan E-Purchasing dan Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA Pemilihan*, Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) Vol.3 No. 1
- Eko Purwono, 2024, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Katalog Pada Pekerjaan Konstruksi*
- Eri Eka Sukarini dan Shofi Juliastuti, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan*, Jurnal Yustitia
- European Commission, 2004, *A Practical Guide For The Commission Service*
- Fariroh, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing Katalog Sesuai Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 09/SE/M/2023 Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2023*, disampaikan dalam acara sosialisasi SE Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2023 (Wilayah Timur), Makassar
- Faza Rahmania dkk, 2024, *Analisis Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Menggunakan Metode E-Procurement*, Jurnal Ilmiah Research Student Vol. 1 No. 4
- Hari Agus Santoso, 2021, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*. Vol. 36 No. 3
- Liza Farihah & Femi Angraini, 2012, *Jurnal Precautionary Principle And Potential Damage In A Case Of State Administrative Decision Related To Environment*, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2005, *World Commission On The Ethics Of Scientific Knowledge And Technology*
- Purnomo Edy Mulyono, 2017, *Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik*, Airlangga Development Journal (ADJ)
- Saut Wolker Sihalohe dkk, 2024, *Efektifitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa (Pbj) Dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud*, Scientific Journal Of Reflection Economic, Accounting, Management and Business Vol. 7, No. 1

Tatsis, 2006, *Procurement in the Greek Food and Drink Industry*, Journal of Purchasing & Supply Management Vol.12

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Republik Indonesia, *“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat”*

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur*

Republik Indonesia, *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik*

Republik Indonesia, *Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*

Republik Indonesia, *Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pengelolaan Katalog Elektronik Sektorial Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa*

Republik Indonesia, *Surat Edaran Menteri Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing Dengan Mekanisme Katalog Elektronik.*

D. Internet dan Bahan Lainnya:

Mudji Santosa, “Kesalahan Evaluasi Akan Berakibat Tipikor?”, pada laman <http://www.mudjisantosa.net/2014/11/kesalahan-evaluasi-tipikor.html>. Diakses pada 15 Mei 2025 pukul 13:30 WIB

Website Berita Kementerian Keuangan, *Pembangunan Infrastruktur Jadi Salah Satu Fokus APBN 2023*, pada laman <https://www.kemenkeu.go.id/informasi->

publik/publikasi/berita-utama/Fokus-APBN-2023, diakses tanggal 20 Januari 2025 Pukul 09.30 WIB.

Website Berita Kementerian Pekerjaan Umum, *Ditjen Bina Konstruksi Dukung Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Transformasi Digital PBJ melalui Katalog Elektronik di Kementerian PUPR*, pada laman <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/ditjen-bina-konstruksi-dukung-implementasi-prinsip-kehati-hatian-dalam-transformasi-digital-pbj-melalui-katalog-elektronik-di-kementerian-pupr/>, diakses 10 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB

Pengadaan Indonesia, *Potensi Kecurangan dalam Pengadaan Melalui E-Katalog*, pada laman <https://pengadaan.or.id/2024/12/03/potensi-kecurangan-dalam-pengadaan-melalui-e-katalog/> diakses pada tanggal 14 Februari 2025 Pukul 11.00 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS), *Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km), 2022*, pada laman <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/U0VOeFZEZFNiVnByUkdGMiNrOTFVVGRHYlZkVGR6MDkjMw==/panjang-jalan-menurut-provinsi-dan-tingkat-kewenangan-pemerintahan--km--2022.html?year=2022>, diakses tanggal 20 Januari 2025 Pukul 13.30 WIB

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), *Sistem Informasi Rencana Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP)*, pada laman <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penyedia/K18> . Diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 14.30 WIB

Website Universitas Diponegoro, *Mengenal Istilah Fraud*, pada laman <https://spi.undip.ac.id/mengenal-istilah-fraud/> diakses tanggal 10 Februari 2025 Pukul 10.30 WIB

